



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MAKASAR
Jl. Lembur No.1 Kelurahan Makasar
Telp. 8009613 – 8009605
JAKARTA

Kode Pos : 13570

Nomor : e-0001/OT.06
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan
SKM Semester 2 Tahun 2025
Kecamatan Makasar

11 September 2025

Kepada
Yth. Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
di
Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur serta sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat tanggal 12 sampai dengan 30 Agustus 2025 di Kelurahan Kecamatan Makasar, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) serta RT, RW, LMK dan FKDM.
2. Berdasarkan hasil survei, diperoleh IKM Kelurahan-Kelurahan yang menjadi agregat Tingkat Kecamatan (IKM Kecamatan). Adapun IKM Kecamatan Makasar Semester 2 Tahun 2025 adalah 99,57 dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Makasar Semester 2 Tahun 2025, terlampir.

Demikian ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih..


Kamat Kecamatan Makasar,
Kamal., S.STP., M.AP.
NIP 198708262006021002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Timur

**coret / hapus yang tidak perlu*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25.00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65.00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Kertas Ukuran A4

1. Dilaporkan ke Walikota
2. Ditembuskan ke Bagian KKPP (dengan mengunggah Laporan SKM Kecamatan dan SKM Kelurahan pada google drive melalui link yang ada pada lampiran I)

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER 2 TAHUN 2025



KECAMATAN MAKASAR

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	1
1. 3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP	5
BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM KELURAHAN	6
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	9
4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4. 2. Tren Nilai SKM	10
BAB V KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	12
1. Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Kelurahan Kecamatan	12
2. Foto-foto Pendukung Kegiatan	13
3. Keputusan Camat tentang pembentukan tim	14
4. Nilai Per unsur di masing-masing Kelurahan	18
5. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester I Tahun 2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan di wilayah Kecamatan Makasar, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2019 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0006 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
12. Keputusan Camat Kecamatan Makasar Nomor e-0006 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tingkat Kelurahan Wilayah Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Kecamatan Makasar.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sejak tahun 2019 hal ini berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan di :

1. Kelurahan Makasar
2. Kelurahan Kebon Pala
3. Kelurahan Pinang Ranti
4. Kelurahan Halim Perdanakusuma
5. Kelurahan Cipinang Melayu

Stakeholder pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

1. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku pembina, perumusan kebijakan dan pendamping dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kelurahan Kecamatan Makasar selaku pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan penyusunan laporan
3. Dinas Kominfotik selaku pengembangan aplikasi *Jaksurvei-Jaki*, penentuan sampling, verifikasi *setting kuesioner*, *grouping* verifikasi responden, *helpdesk*, *monev*, *cleansing* serta analisis data

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan, sebanyak 6 (enam) Kelurahan telah menyampaikan laporannya.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM KELURAHAN

Data pada tabel ini dapat dilihat pada tautan : <https://bit.ly/47hS5Y9>

No	Kelurahan	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Semester II Tahun 2025 (%)			
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9										
1	Kelurahan Makasar	Semester 2 2025	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	4.00	4.00	3.99	4.00	99.98	A (Sangat Baik)	772	SKM Online (Jaksurvei)	1 Persyaratan	1. Mengadakan rapat evaluasi untuk memantau progres penyelesaian aduan 2. Melaksanakan pemeliharaan alat penunjang ketertiban, 3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai saluran dan tata cara penyampaian aduan. 4. Mengadakan rapat terkait pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat	100%			
2	Kelurahan Kebon Pala	Semester 2 2025	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	99.94	A (Sangat Baik)	700	SKM Online (Jaksurvei)	1 Persyaratan	1. Mengadakan pelatihan waktu penyelesaian lebih dipercepat disesuaikan dengan kebutuhan dalam tindaklanjut laporan/aduan. 2. Melakukan Bimtek/Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi bagi Pengelola RPTRA. 3. Perbaikan Sarana dan prasarana pada saat diperlukan dalam keadaan baik.	100%			
																			2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
																				3 Penanganan Sarana dan Aduan	

No	Kelurahan	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Semester II Tahun 2025 (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
3	Kelurahan Pinang Ranti	Semester 2 2025	3.73	3.72	3.72	3.74	3.73	3.72	3.74	3.72	3.71	93.14	A (Sangat Baik)	772	SKM Online (Jaksurvei)	1 Persyaratan Pelayanan	1. Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait penanganan saran dan aduan 2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai 3. Melakukan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kader Posyandu	100%
																2 Kompetensi Pelaksana		
																3 Perilaku Petugas Pelayanan		
4	Kelurahan Halim Perdanakusuma	Semester 2 2025	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	99.81	A (Sangat Baik)	612	SKM Online (Jaksurvei)	1 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Mengadakan pelatihan waktu penyelesaian lebih dipercepat disesuaikan dengan kebutuhan dalam tindaklanjut laporan/aduan. 2. Melakukan Bimtek/Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi bagi Pengelola RPTRA. 3. Perbaikan Sarana dan prasarana pada saat diperlukan dalam keadaan baik.	100%

No	Kelurahan	Periode Pelaksa- naan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Semester II Tahun 2025 (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
5	Kelurahan Cipinang Melayu	Semester 2 2025	3,97	3.96	3.96	3.96	3.97	3,97	3.96	3.96	3.97	99,12	A (Sangat Baik)	938	SKM Online (Jaksurvei)	1 Persyaratan Pelayanan	1. Rapat Internal Pegawai dalam mengevaluasi SOP yang perlu diterapkan agar lebih fleksibel namun tidak melanggar aturan yang berlaku. 2. Melaksanakan Sosialisasi bagi Petugas PPSU pada saat pengarahan rutin setiap bulannya. 3. Menambahkan sarana dan prasarana yang diperlukan.	100%
															2 Prosedur Pelayanan			
															3 Sarana dan Prasarana			
Rata-rata Kecamatan			3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.92	3.93	3.93	3.93	98,41	A (Sangat Baik)	3.794				100%

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh IKM Kecamatan Makasar yaitu 98,41, dapat diketahui bahwa :

1. Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,92 selanjutnya nilai lainnya mendapat nilai unsur yang sama yaitu 3,93.
2. Nilai terendah IKM diperoleh oleh Kelurahan Pinang Ranti dengan nilai IKM 93,14 dengan faktor unsur dirata-rata penilaian terendah yaitu unsur penilaian Sarana Pendukung Pelayanan (U9) dengan nilai 3,71 dengan pelayanan posyandu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

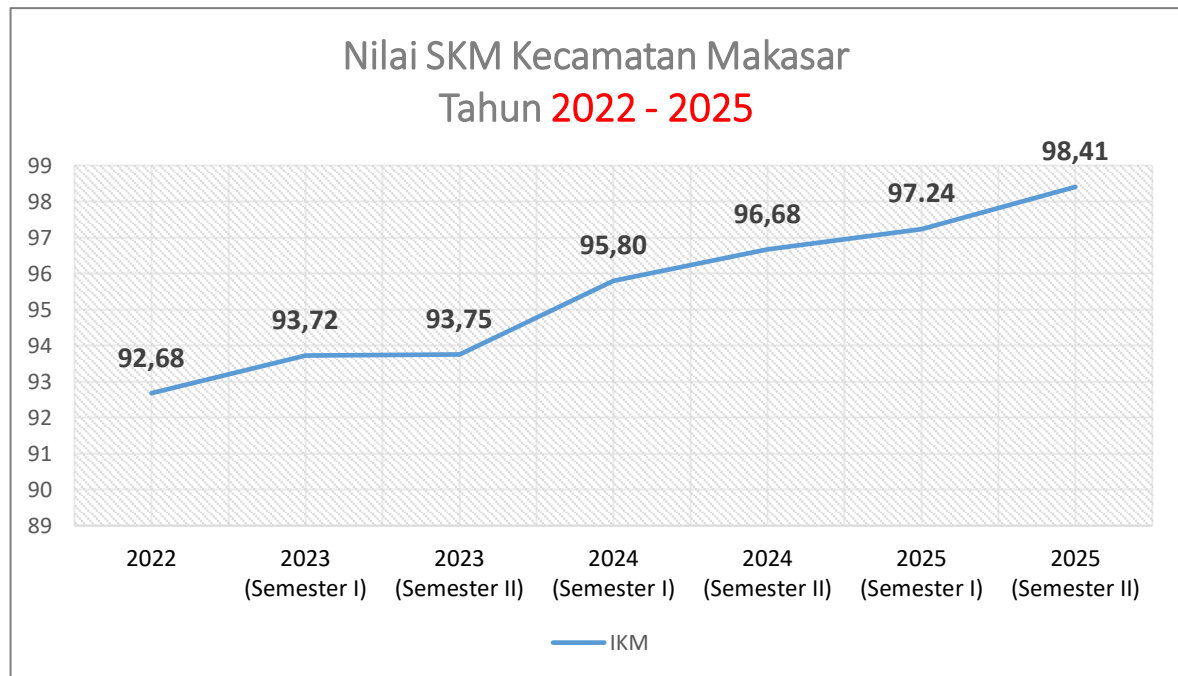
- Petugas kurang sopan dan ramah dalam melayani.
- Kompetensi Petugas agar ditingkatkan
- Sarana Pendukung dalam pelayanan posyandu yang kurang memadai.
- Penanganan aduan keluhan masyarakat cepat ditindaklanjuti.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Belum optimalnya pemanfaatan Sosial Media dalam memberikan informasi terkait persyaratan pelayanan.
- Kurangnya kompetensi berupa pelatihan bagi petugas ketika memberikan pelayanan.
- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada seluruh Petugas Layanan.
- Belum adanya kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Petugas Layanan.
- Belum adanya Sarana dan Prasarana Pendukung untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

4. 2. Tren Nilai SKM

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di Kecamatan Makasar dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester 2 Tahun 2025 di lingkup Kecamatan Makasar

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode yakni pada Semester 2 Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kecamatan Makasar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM Semester 2 Tahun 2025 yaitu 98,41 Nilai IKM di lingkup Kecamatan Makasar menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester 2 2025.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak Enam Kelurahan telah menyampaikan laporannya.

Dari seluruh Kelurahan yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Jakarta, 11 September 2025

Camat Kecamatan Makasar,



Kamal., S.STP., M.AP.
NIP. 198708262006021002

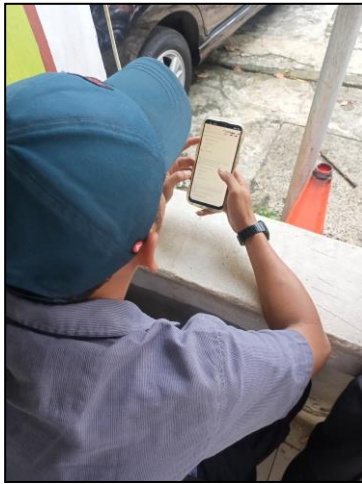
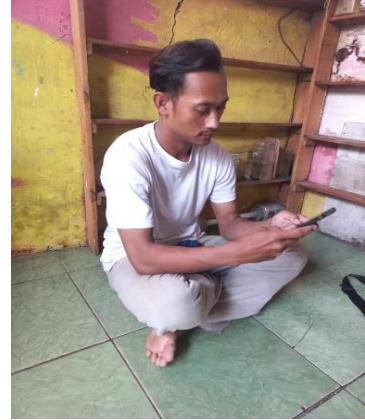
LAMPIRAN

1. Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Kelurahan Kecamatan Makasar

No	UKPD*	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	Kelurahan dan Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Matraman
2	Kelurahan dan Kecamatan Pulogadung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Pulogadung
3	Kelurahan dan Kecamatan Jatinegara	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Jatinegara
4	Kelurahan dan Kecamatan Kramat Jati	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Kramatjati
5	Kelurahan dan Kecamatan Pasar Rebo	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025PasarRebo
6	Kelurahan dan Kecamatan Cakung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Cakung
7	Kelurahan dan Kecamatan Duren Sawit	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Durensawit
8	Kelurahan dan Kecamatan Ciracas	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Ciracas
9	Kelurahan dan Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Makasar
10	Kelurahan dan Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Cipayung

**pilih sesuai lokasi unit kerja*

2. Foto-foto Pendukung Kegiatan



3. Keputusan Camat tentang pembentukan tim



KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR e-0010 Tahun 2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Peraturan ...

4.

3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0006 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh Instansi Pemerintah di tingkat Kecamatan;

c. menyusun ...

- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dan menyampaikan laporan ke tingkat Kota.

KETIGA : Unit Pelayanan Publik yang akan disurvei dan dievaluasi adalah Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Camat Kecamatan Makasar ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2025

CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



KAMAL
NIP 198708262006021002

Tembusan:

1. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Para Lurah Kecamatan Makasar

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Makasar
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : e-0010 Tahun 2025
Tanggal : 29 April 2025

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

Pengarah : Camat Kecamatan Makasar
Penanggung Jawab : Sekretaris Kecamatan Makasar
Ketua Pelaksana : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Anggota : 1. Unsur Staf Seksi Pemerintahan
2. Unsur Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Unsur Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat



CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

KAMAL

NIP 198708262006021002

6. Nilai Per unsur di masing-masing Kelurahan

a. Nilai IKM di Kelurahan Makasar

JenisPelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan	Nilai IKM Konversi
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)		
Jumantik	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100
Ketertiban Umum	4.00	4.00	3.99	3.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	99.95
PKK	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100
Posyandu	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	4.00	3.99	99.97
PPSU	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100
RT/RW,LMK dan FKDM	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	99.97
IKM per unsur	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	4.00	4.00	3.99	4.00	3.99	99.98
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Rata-rata IKM Layanan	99.98 (A atau Sangat Baik)										

b. Nilai IKM di Kelurahan Kebon Pala

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	4.00	3.99
Ketertiban Umum	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99
PKK	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Posyandu	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	4.00	4.00	3.99
PPSU	4.00	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99
RPTRA	4.00	4.00	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99
RT/RW,LMK dan FKDM	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
IKM per unsur	4.00	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99
Kategori	A	A	A	A	A	A	B	B	A	
Rata-rata IKM Layanan	99.94 (A atau Sangat Baik)									

c. Nilai IKM di Kelurahan Pinang Ranti

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan	Nilai IKM Konversi
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)		
Jumantik	3.72	3.72	3.70	3.72	3.70	3.73	3.69	3.72	3.70	3.71	92.76
Ketertiban Umum	3.73	3.74	3.75	3.78	3.74	3.74	3.76	3.74	3.71	3.74	93.58
PKK	3.75	3.75	3.76	3.74	3.75	3.75	3.75	3.73	3.73	3.74	93.67
Posyandu	3.72	3.71	3.69	3.69	3.69	3.69	3.68	3.65	3.67	3.68	92.25
PPSU	3.71	3.69	3.70	3.75	3.72	3.69	3.77	3.72	3.73	3.72	92.99
RPTRA	3.72	3.71	3.71	3.74	3.73	3.73	3.74	3.74	3.74	3.72	93.22
RT/RW,LMK dan FKDM	3.75	3.72	3.74	3.77	3.75	3.73	3.76	3.72	3.70	3.73	93.48
IKM per unsur	3.73	3.72	3.72	3.74	3.73	3.72	3.74	3.72	3.71	3.72	93.14
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Rata-rata IKM Layanan	93.14 (A atau Sangat Baik)										

d. Nilai IKM di Kelurahan Halim Perdanakusuma

JenisPelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan	Nilai IKM Konversi
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)		
Jumantik	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	99.80
Ketertiban Umum	3.99	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	4.00	4.00	4.00	3.99	99.96
PKK	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	99.82
Posyandu	3.99	3.99	3.99	3.98	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.98	99.79
PPSU	3.98	3.99	3.99	3.98	4.00	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	99.68
RT/RW,LMK dan FKDM	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	99.82
IKM per unsur	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	99.81
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Rata-rata IKM Layanan	99.81 (A atau Sangat Baik)										

e. Nilai IKM di Kelurahan Cipinang Melayu

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan	Nilai IKM Konversi
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)		
Jumantik	3,97	3,97	3,96	3,96	3,97	3,96	3,96	3,95	3,98	3,97	99,16
Ketertiban Umum	3,96	3,96	3,96	3,94	3,97	3,97	3,97	3,96	3,97	3,96	99,03
PKK	3,96	3,95	3,95	3,97	3,96	3,97	3,93	3,95	3,95	3,96	98,87
PPSU	3,99	3,97	3,96	3,96	3,98	3,99	3,97	3,97	3,97	3,97	99,34
Posyandu	3,97	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97	3,95	3,94	3,96	98,92
RPTRA	3,97	3,97	3,99	3,97	3,98	3,97	3,97	3,96	3,98	3,97	99,41
RT/RW, LMK dan FKDM	3,95	3,96	3,97	3,97	3,97	3,97	3,96	3,96	3,97	3,97	99,08
IKM per unsur	3,97	3,96	3,96	3,96	3,97	3,97	3,96	3,96	3,97	3,97	99,12
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Rata-rata IKM Layanan	99.83 (A atau Sangat Baik)										

7. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester II Tahun 2025

No	UKPD*	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	Kelurahan dan Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Matraman
2	Kelurahan dan Kecamatan Pulogadung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Pulogadung
3	Kelurahan dan Kecamatan Jatinegara	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Jatinegara
4	Kelurahan dan Kecamatan Kramat Jati	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Kramatjati
5	Kelurahan dan Kecamatan Pasar Rebo	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025PasarRebo
6	Kelurahan dan Kecamatan Cakung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Cakung
7	Kelurahan dan Kecamatan Duren Sawit	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Durensawit
8	Kelurahan dan Kecamatan Ciracas	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Ciracas
9	Kelurahan dan Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Makasar
10	Kelurahan dan Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2025Cipayung

**pilih sesuai lokasi Unit Kerja*